



Peran Kepala Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar

Luk Luk Yata Lalak Muslimin*, Muqowim

Program Interdisciplinary Islamic Studies, Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Corresponding Author. Email: luklukyata@gmail.com

Abstract: This study aims to reveal the role of school principals in inclusive education policies at the elementary school level. This research method uses a descriptive method with a qualitative approach. The subjects of this study were principals, teachers, and guardians of students at SDN 20 Mataram. Data collection techniques in this study used interviews, observation, and documentation. Meanwhile, the data analysis technique used descriptive qualitative analysis. The results of this study are the principal's role by making changes and making policies that support the implementation of inclusive education in planning, process, and evaluation. The supporting and inhibiting factors of the principal's policy on inclusive education include the positive attitude of accepting students with special needs from the principal, teachers, and education staff without any difference. Second, there is additional funding provided by the government. Third, flexible school curriculum. Fourth, there are supporting facilities and infrastructure as well as learning resources. Fifth, the location of the school adjacent to the SLB. In contrast, the inhibiting factor is the absence of a special assistant teacher at SDN 20 Mataram.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran kepala sekolah terhadap kebijakan pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, guru, dan wali murid di SDN 20 Mataram. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kepala sekolah dalam melaksanakan perannya dengan melakukan sebuah perubahan-perubahan, membuat kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi, baik dalam perencanaan, proses, dan evaluasi. Faktor pendukung dan penghambat kebijakan kepala sekolah terhadap pendidikan inklusi, yakni pertama, adanya sikap positif menerima siswa berkebutuhan khusus baik dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan tanpa ada perbedaan. Kedua, adanya pendanaan tambahan yang diberikan pemerintah. Ketiga, kurikulum sekolah yang fleksibel. Keempat, adanya sarana dan prasarana serta sumber belajar yang mendukung. Kelima, letak lokasi sekolah yang berdekatan dengan SLB. Sedangkan faktor penghambat yaitu tidak adanya guru pendamping khusus di SDN 20 Mataram.

Article History

Received: 26-01-2021
Revised: 26-05-2021
Accepted: 31-06-2021
Published: 07-09-2021

Key Words:

The Role of School Principals, Policies, Inclusive Education.

Sejarah Artikel

Diterima: 26-01-2021
Direvisi: 26-05-2021
Disetujui: 31-06-2021
Diterbitkan: 07-09-2021

Kata Kunci:

Peran Kepala Sekolah, Kebijakan, Pendidikan Inklusi.

How to Cite: Lalak Muslimin, L., & Muqowim, M. (2021). Peran Kepala Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(3), 708-718. doi:<https://doi.org/10.33394/jk.v7i3.3468>



<https://doi.org/10.33394/jk.v7i3.3468>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan dengan misi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan belajar dari semua anak, remaja, dan orang dewasa yang



difokuskan secara spesifik kepada mereka yang disabilitas. Selanjutnya, sistem layanan pendidikan inklusi yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh anak tanpa terkecuali untuk belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman kebutuhan siswa, sehingga potensi anak dapat berkembang secara maksimal, dalam arti tidak ada alasan untuk tidak sekolah karena setiap anak memiliki hak untuk berpendidikan (Indianto, 2013). Dalam konferensi Salamanca tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus terlahirlah sebuah paradigma baru, yaitu pendidikan inklusi yang menyertakan anak berkebutuhan khusus untuk dapat sekolah di sekolah umum (UNESCO, 1994) dan kembali dipertegas pada forum Pendidikan Dunia di Dakar tahun 2000. Pendidikan inklusi mempunyai arti bahwa sekolah harus mengakomodasi untuk semua anak tanpa melihat masalah pada anak tersebut baik dalam segi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain. (Ni'matuzahroh dan Yuni Nurhamida, 2016). Sehingga Pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang melihat bagaimana mengubah system Pendidikan agar dapat menerima keberagaman siswa, memiliki tujuan utama agar guru dan siswa merasa nyaman dalam keberagaman yang dimiliki, pada akhirnya menjadi suatu tantangan dalam lingkungan belajar dan merancang pembelajaran, karena perlu disadari bahwa beragaman bukanlah suatu masalah yang harus ditakuti. Hal ini menjadi sangat penting untuk terus disosialisasikan sehingga adanya sebuah perubahan untuk penerimaan keberagaman dalam masyarakat yang luas (Bailey & Plessis, 2006).

Inklusi dapat meningkatkan; (a) kesadaran dan toleransi dari perbedaan, (b) meningkatkan empati kesemua orang, (c) belajar saling membantu orang lain, dan (d) menemukan serta belajar keterampilan khusus dan unik (seperti menggunakan bahasa isyarat dan mungkin menggantinya dengan penggunaan teknologi bantu) (Downing & Peckhamhardin, 2007). Inklusi mengajarkan kita untuk bersikap hormat akan keberagaman dan keunikan dari masing-masing individu dan menggambarkan pandangan yang terbuka untuk semua (Isosomppi & Leivo, 2015). Sudah mampu melakukan perubahan dengan cara mengkonsep lingkungan inklusi, baik semua orang yang tinggal disana, beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa aman bahwa dengan mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari mendapat ruang lingkup dalam beraktifitas. Mewujudkan dan mensukseskan hal tersebut sangat diperlukan kerjasama dari berbagai pihak dengan dipertegas dalam peraturan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009. Pada pelaksanaannya, keberhasilan pendidikan inklusi terhadap pembelajaran anak disabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pandangan, kebijakan sekolah, kerjasama dan koordinasi antara guru kelas dengan guru pendidikan khusus serta kemampuan mengajar guru (Chopra, 2008; Musyafira & Hendriani, 2021; Wulandari & Hendriani, 2021).

Dengan adanya keberadaan sekolah menjadi sebuah lembaga formal penyelenggaraan pendidikan inklusi yang memiliki misi untuk keberhasilan sistem pendidikan nasional. Kepala sekolah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam menganalisis dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Perlu diperhatikan oleh kepala sekolah dalam membuat atau mengambil kebijakan baru adalah menciptakan perubahan baru. Suatu kebijakan baru yang dibuat bertujuan untuk melakukan sebuah perubahan baru. Dengan kebijakan baru dari kegiatan tersebut yang mana dalam praktiknya pasti akan ditemukan sebuah penolakan dari personel sekolah atau warga sekolah dengan menyebutkan faktor-faktor penolakan tersebut. Maka dari itu pentingnya komitmen sejak awal oleh seluruh warga sekolah, agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Tahun 2004 pendidikan inklusi di Provinsi Nusa Tenggara Barat baru mulai dirintis dengan menunjuk dua Sekolah Dasar Negeri Kota Mataram. Di dua sekolah penyelenggara

Pendidikan inklusif ini berjalan dengan berbagai hambatan dan kesulitan yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan dari berbagai pihak. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dalam segi penerimaan, keterbukaan, keingintahuan praktik pendidikan inklusif di lapangan ditemukan bahwa sudah semakin berkembang dengan adanya pandangan kepala sekolah dan sebagian guru yang luas mengenai pendidikan inklusif ini dengan memperhatikan kebutuhan siswa yang beragam. Dipertegas kembali dengan peraturan daerah gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pendidikan inklusi dalam pasal-pasalnya terdapat ketentuan umum, ruang lingkup, tanggung jawab, perizinan, penyelenggaraan, koordinasi, pembiayaan, dan penghargaan dan sanksi. Pendidikan inklusif di Kota Mataram bukan hanya berlangsung di tingkat sekolah dasar saja, tetapi berlangsung di beberapa SMP dan SMA/SMK.

Salah satu Sekolah Inklusi di Kota Mataram tingkat sekolah dasar yaitu SDN 20 Mataram telah menyelenggarakan sistem layanan pendidikan inklusi sejak tahun 2004 lalu dengan sejarah awal tahun hanya menerima 2 siswa berkebutuhan khusus, akan tetapi sejak tahun 2017-2019 menerima lebih dari dua, hingga tahun 2021 siswa berkebutuhan khusus yang aktif berjumlah 42 dan sudah meluluskan 49 siswa berkebutuhan khusus. Dengan rincian tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Siswa Inklusi dan Jenis Disabilitas

Kelas	Jenis Disabilitas	Jumlah
I	ADHD	2
II	Dandy Walker Syndrome	10
	ADHD	
	Tuna grahita	
	Lamban belajar	
III	Down syndrome	7
	Autis	
	Tuna rungu	
	Tuna grahita	
IV	Lamban belajar	12
	Autis	
	ADHD	
	Disleksia	
V	Lamban belajar	7
	Autis	
	ADHD	
	Low Fision	
VI	Tuna Laras	4
	ADHD	
	Lamban belajar	

Dalam proses menuju sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tidaklah mudah. Dalam pelaksanaannya untuk menerapkan sebuah kebijakan baru, perlu adanya perjuangan dan tingkat kesabaran yang cukup tinggi, karena tidak semua guru, komite, dan siswa maupun orang tua menerima keputusan tersebut. Tentu perlu kesiapan yang mantang untuk melangkah kearah Pendidikan yang lebih maju lagi dengan melayani kebutuhan-kebutuhan siswa yang beragam. Dalam kondisi lingkungan sekolah yang belum mendukung

penyelenggaraan pendidikan inklusi, maka dapat dilihat dari kurang reseptatif di sekolah tersebut, ruang koridor, halaman, lapangan sekolah terlalu sempit. Selanjutnya dalam segi kebijakan di sekolah inklusi belum secara maksimal dilaksanakan terkendala dengan, kompetensi guru, sarana prasarana, dan pembiayaan. Kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Syafaruddin, 2008).

Maka kepala sekolah sebagai seorang pemimpin di sekolah, sudah seharusnya memberi contoh bagaimana seharusnya menerima dan memberikan sistem pelayanan kepada individu berkebutuhan khusus. Melalui kepemimpinannya seorang kepala sekolah sangat penting untuk selalu mensosialisasikan bahwa pentingnya menerima perbedaan individu berkebutuhan khusus di sekolah umum atau *mainstream* secara bertahap namun pasti dalam program pendidikan inklusi ini. Untuk itu, kepala sekolah harus selalu menyadari semua sumber daya manusia sekolah agar selalu berupaya merencanakan program yang bermanfaat, baik itu yang berupa fisik bangunan maupun non fisik misal dalam mendesain pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak. Sehingga dengan pandangan positif atau luas kepala sekolah, terhadap pendidikan inklusi sangat mempengaruhi pada kesuksesan proses pembelajaran dengan *setting* inklusi dengan kebijakan-kebijakan yang diambil secara tepat.

Berdasarkan hasil observasi pada kepala sekolah mengenai pandangannya terhadap pendidikan inklusi sudah cukup luas akan tetapi masih saja ada kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya baik segi perencanaan, proses dan evaluasinya. Masih harus melakukan sosialisasi terhadap warga sekolah mengenai kebijakan-kebijakan yang diputuskan sehingga pelaksanaan pendidikan inklusif ini sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu, *pertama* oleh Johandri taufan (2014) mengenai Kebijakan-kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif di sekolah X kota Jambi. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi berjalan dengan baik. Masyarakat sekolah sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang di buat oleh kepala sekolah sebagai sebuah usaha-usaha kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi. Dari proses hasil penelitian dan pembahasan ini, disusunlah sebuah desain kebijakan yang merupakan hasil desain peneliti terkait pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Desain kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi memberikan kejelasan mengenai hal-hal yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. *Kedua*, penelitian dilakukan Dinar Westri Andini (2018), hasil penelitian ini bahwa 20 dari 25 kepala sekolah di SD DIY memiliki pandangan inklusif yang sempit maka penerimaannya masih sebatas anak berkebutuhan khusus, tetapi mayoritas Kepala sekolah setuju dan terbuka untuk menerima siswa berkebutuhan khusus untuk dapat bersekolah di sekolah biasa dan belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler. *Ketiga* penelitian yang dilakukan oleh Lukitasari (2017), penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan inklusif kebijakan di Kota Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Pendidikan inklusif di Salatiga dianggap baik, yaitu pencapaian sebesar 65%. *Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Fitriatun (2017), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sikap guru terhadap pendidikan inklusif di Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru di Kota Mataram memiliki sikap yang tinggi atau positif atau menerima terhadap pendidikan inklusif dengan persentase 59% berada pada kategori tinggi, dan 41% guru berada pada kategori rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap peran kepala sekolah terhadap



kebijakan pendidikan inklusi di SDN 20 Mataram serta faktor pendukung dan penghambat kepala sekolah dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah atau natural yang dilakukan dengan cara melihat langsung kondisi dilapangan (Sugiyono, 2013). Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan wali murid SDN 20 Mataram. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Proses analisis data secara deskriptif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumen lainnya. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan dua tahap, diantaranya: analisis sebelum di lapangan, dan analisis selama di lapangan dengan model Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkah analisis data diantaranya: reduksi data, *display* data (penyajian data), dan kesimpulan/verifikasi. Untuk mengetahui keabsahan data yang digunakan Teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data mengecek kevalidan data (Sugiyono, 2015).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Kepala Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif di SDN 20 Mataram

Kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi di sekolah, sikap kepemimpinannya yang dimiliki kepala Sekolah akan sangat berpengaruh pada saat menentukan kebijakan guna kemajuan sekolah. Menurut Wahjosumidjo (2002) berpendapat bahwa: “Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang bertugas memimpin suatu sekolah di mana dalam proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi proses interaksi belajar mengajar antara guru dan murid. Semua kegiatan dan keputusan itu harus didasarkan oleh pengetahuan kepala sekolah yang mana kepala sekolah bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut. Dengan sikap kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menciptakan perubahan di sekolah yaitu dengan cara membuat kebijakan (Wahjosumidjo, 2002).

Kepemimpinan kepala sekolah adalah bentuk cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa dan pihak lainnya. Kepala sekolah juga berperan penting dalam meningkatkan suatu kinerja guru (E. Mulyasa, 2011). Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin tentunya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, memiliki kemampuan teknis dalam menajemenkan sekolah, memiliki analitis yang tajam dalam sebuah kebijakan, dan terpenting yaitu memiliki karakter yang tegas dan berani mengambil keputusan, etos kerjanya tinggi. Tidak mudah terpengaruh terhadap hal-hal di luar kapasitasnya menjadi kepala sekolah.

Sehubungan dengan peran kepemimpinan kepala sekolah yang sangat berpengaruh dan menjadi *figure* yang positif bagi sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Sesuai dengan hasil penemuan dilapangan bahwa, sekolah inklusi di SDN 20 Mataram ini membuat tim koordinator yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut dengan adanya tim koordinator ini, salah satu bentuk memfasilitasi mereka untuk pelayanan khusus terhadap siswa yang berkebutuhan khusus. Perlu diketahui bahwa usaha mensukseskan pendidikan inklusi di sekolah yang dipimpinnya, seorang kepala sekolah juga mempunyai peran yang sangat besar sebab dari kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Menurut Smith (2014) kepala sekolah merupakan pemimpin yang mempunyai status penting



di dalam sekolah. Hal ini dikarenakan kepala sekolah merupakan pengambil kebijakan mengenai menjalankan program-program yang lebih terintegrasi serta mempunyai pengetahuan yang lebih mengenai menjalankan prosedur Pendidikan khusus (Smith, 2014) Sehingga kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya, bentuk tanggung jawab dan usaha untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi di SDN 20 Mataram, dapat dilihat dari program-program yang dibuat, yang sudah berjalan bagaimana realisasinya, dan evaluasi yang dilakukan mengenai pendidikan inklusi ini. Sebab peran kepemimpinan kepala sekolah dalam menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus sebagai suatu perbedaan dan harus diupayakan atau dioptimalkan terus menerus dalam pelayanannya sehingga semua dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan awal.

Kepala sekolah juga memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan mengenai kurikulum bagi siswa berkebutuhan khusus ini, yaitu kepala sekolah memberikan kebijakan untuk menjadikan kurikulum tersebut menjadi fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Sesuai dengan data lapangan bahwa, pada saat proses belajar mengajar dikelas guru melakukan modifikasi dan akomodasi terhadap siswa berkebutuhan khusus. Yaitu dengan mengurangi konten belajar. Selanjutnya juga dalam proses evaluasi dilakukan dengan sangat fleksibel sehingga para pengajar disini dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.

Terlihat disini bahwa kebijakan kepala sekolah untuk memberikan kebijakan terhadap semua guru bebas dalam mengatur kondisi ruang kelas nya dengan senyaman mungkin yang tujuannya agar semua anak di kelas tersebut dapat mengakses pembelajaran dengan kemampuan masing-masing siswa. Menurut Nichols (Syafaruddin: 2008), “kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati saat pengambilan keputusan akhir dan bukan kegiatan yang diulang-ulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan untuk kepentingan bersama”. Pendapat di atas menunjukkan bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing suatu organisasi atau komunitas (Syafaruddin; 2008). Selanjutnya ada tiga proses kebijakan, yaitu: formulasi, implementasi, dan evaluasi (Putt dan Springer dalam Syafaruddin; 2008).

Selanjutnya dalam pendanaan penyelenggaraan Pendidikan inklusi ini, kepala sekolah membuat sebuah kebijakan seperti mengajukan dana bantuan ke pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan inklusi, seperti ke dinas Pendidikan tingkat provinsi. Yang mana di SDN 20 Mataram dalam pengajuan mengenai pendanaan ini dilakukan secara mandiri, yaitu kepala sekolah dengan para guru-guru melakukan kerja sama dengan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan saat proses belajar mengajar contohnya seperti alat pelajaran, alat peraga, dan media pendidikan. Dengan dana yang didapat itu, kepala sekolah memberikan kebijakan dalam proses menggunakannya misalnya untuk mendukung sarana dan prasarana serta perbaikan infrastruktur sekolah guna mendukung atau mengakomodasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Sesuai data yang ditemukan di lapangan yaitu sekolah dasar inklusi membangun sebuah ruang sumber inklusi. Dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap adalah bentuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan tidak kalah penting yaitu aksesibilitas bagi kelancaran mobilitas siswa berkebutuhan khusus.

Faktor pendukung dan Penghambat Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SDN 20 Mataram

Bentuk dukungan dari semua masyarakat sekolah dengan pengambilan kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusi ini sangat mendorong kepala sekolah untuk lebih



memperhatikan lagi dalam proses penyelenggaraannya. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan beberapa faktor pendukung penyelenggaraan Pendidikan inklusi di SDN 20 Mataram, yaitu kepala sekolah beserta tenaga pendidik dan kependidikan memiliki sikap penerimaan yang besar terhadap perbedaan-perbedaan, sehingga pandangannya mengenai Pendidikan inklusi ini sangatlah luas. Terlihat dari sikap jumlah penerimaan siswa berkebutuhan khusus setiap tahunnya ini bertambah. Dengan proses penerimaannya ini menunjukkan bahwa tidak ada bentuk diskriminasi yang dilakukan. Ini sesuai dengan teori menurut Tarsidi, bahwa sekolah inklusi memiliki karakteristik yang unik tidak ada bentuk diskriminasi, artinya bahwa sekolah inklusi harus memberikan layanan Pendidikan kepada setiap anak tanpa terkecuali, dengan pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman yang dimiliki setiap anak. Sehingga dapat disimpulkan penemuan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa sikap penerimaan kepala sekolah dan warga sekolah lainnya ini menunjukkan pandangan yang luas mengenai Pendidikan inklusi.

Kedua, adanya pendanaan tambahan yang diberikan Dinas Pendidikan Provinsi yang diberikan sekolah untuk mengembangkan penyelenggaraan Pendidikan inklusi. Berdasarkan temuan di lapangan, didapatkan bahwa kepala sekolah mendapat bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi karena prestasi dalam mengembangkan Pendidikan inklusi dengan optimal di Kota Mataram dengan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Ketiga, kurikulum sekolah yang fleksibel. Berdasarkan temuan di lapangan yaitu, kurikulum yang digunakan di SDN 20 Mataram ini, di desain dengan sefleksibel mungkin, yang disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, diperjelas kembali bahwa satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusi menggunakan kurikulum tingkat satuan Pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai bakat, minat dan potensinya. Dalam pembelajaran memiliki prinsip-prinsip yang disesuaikan dengan siswa berkebutuhan khusus baik dalam system penilaian, yang mana berpedoman pada kurikulum yang diterapkan. Hal ini didasarkan dengan pandangan yang luas kepala sekolah dalam membuat kebijakan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kemampuan siswa yang berkebutuhan khusus. Sehingga kurikulum yang berlaku di SDN 20 Mataram ini bersifat fleksibel yang mana tujuan utama agar semua siswa dapat kesempatan untuk belajar bersama-sama di kelas reguler. Keempat, adanya sarana dan prasarana serta sumber belajar yang mendukung siswa berkebutuhan khusus.

Berdasarkan temuan di lapangan yaitu sarana dan prasarana sumber belajar di SDN 20 Mataram sangat memadai dan dapat atau mudah di akses oleh siswa berkebutuhan khusus. Dengan adanya kebijakan kepala sekolah dalam memfasilitasi sarana dan prasana ini sangat di dukung oleh semua pihak, karena mendukung suksesnya penyelenggaraan Pendidikan inklusi di SDN 20 Mataram. Terlebih dengan adanya sarana dan prasarana ini siswa berkebutuhan khusus sangat membatu proses belajar sehingga siswa berkebutuhan khusus ini dapat mengakses mendapat kesempatan yang sama dengan siswa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 mengenai penyandang disabilitas, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesempatan dalam segala aspek kehidupan, dipertegas kembali pada pasal 10 ayat 2, mengenai ppenyediaan aksesibilitas yaitu menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Dengan adanya pandangan yang luas seorang kepala sekolah dalam aksesibilitas fisik yang mencakup akses terhadap berbagai bangunan, alat transportasi dan komunikasi, serta berbagai fasilitas di luar ruangan seperti *outbound*. Perlu



disadari bahwa dengan adanya sarana dan prasarana di sekolah Inklusi SDN 20 Mataram ini sangat membantu semua pihak dari kepala sekolah, guru, staf, orang tua dan siswa untuk mensukseskan Pendidikan inklusi. Kelima, yaitu letak lokasi sekolah inklusi ini juga berdekatan dengan sekolah luar biasa. Berdasarkan temuan di lapangan yaitu, letak sekolah inklusi ini sangat strategis dan berdekatan dengan sekolah luar biasa sehingga mempermudah pihak sekolah untuk berkonsultasi atau berdiskusi mengenai siswa berkebutuhan khusus ini, dan juga kepala sekolah membuat sebuah kebijakan untuk berkerja sama dengan sekolah luar biasa ini yaitu ketika evaluasi akademik dengan menggunakan braile sehingga sekolah inklusi membutuhkan guru khusus untuk membaca hasil evaluasi yang dikerjakan siswa berkebutuhan khusus dengan jenis tuna netra ini.

Selanjutnya yaitu faktor penghambat terkait kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusi di SDN 20 Mataram yaitu, tidak adanya guru pendamping khusus, berdasarkan temuan di lapangan ditemukan bahwa permasalahannya yaitu tidak adanya guru pendamping khusus, sehingga guru wali kelas atau guru mata pelajaran masing-masing harus membuat secara khusus dalam mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Tidak bisa dihindari bahwa peran guru Pendidikan khusus sangat diharapkan kehadirannya sebab, dikatakan efektif dilihat dari pencapaian dan pembelajaran siswa (Amalia dan Farida, 2021). Dipertegas kembali oleh Kustawan (2013) mengemukakan bahwa sekolah inklusi seharusnya mampu menghadirkan guru pembimbing khusus dari lulusan Pendidikan Luar Biasa, dengan harapan mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam melayani anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 bahwa Pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, bahwa pemerintah kabupaten/ kota perlu menyediakan paling sedikit satu orang guru pendamping khusus (GPK). Ini juga disebutkan oleh kabid Sekolah Luar biasa yaitu Ibu Hj. Eva Sofia Sari menjadi sebuah permasalahan di lapangan, bahwa masih kekurangan guru pendamping khusus ini, akan tetapi dengan permasalahan tersebut kabid dan kepala dinas Pendidikan tingkat provinsi terus mengintruksikan kepala sekolah untuk terus melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru untuk mengajar siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi Kota Mataram.

Melihat peran kepala sekolah dalam kebijakan sekolah penyelenggara Pendidikan inklusi dan faktor pendukung dan penghambat kebijakan sekolah penyelenggara Pendidikan inklusi di Kota Mataram menunjukkan bahwa pandangan kepala sekolah SDN 20 Mataram mengenai Pendidikan inklusi yang sangat luas. Dengan penerimaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah regular yang setiap tahunnya terus meningkat, sesuai dengan teori menurut Foreman (2005) bahwa inklusi adalah semangat keterbukaan dan menyambut akan keberagaman siswa dari berbagai latar belakang baik kemampuan, budaya, ras, suku, etnik dan latar belakang sosial, sehingga dalam praktiknya disini yaitu sekolah menyediakan dan mendesain lingkungan yang bisa menerima semua anak sebagai bagian dari masyarakat sekolah.

Dengan adanya pemahaman yang sesuai akan membentuk sebuah pemikiran bagaimana cara sekolah untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan siswa, sehingga disini tidak lagi menjadikan sebuah permasalahan yang dimiliki individual atau siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Sudah mampu mengubah pandangan yang awalnya melihat permasalahan yang dimiliki siswa berkebutuhan khusus bahwa adanya perbedaan atau kelainan menjadi bagaimana mengubah sistem layanan Pendidikan agar dapat diakses oleh semua anak tak terkecuali anak berkebutuhan khusus memberikan kesempatan yang sama



untuk belajar bersama-sama sekolah reguler. Ini sesuai dengan teori sosial model yaitu pandangan sosial beranggapan bahwa masalah disabilitas tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial yang luas. Dalam pandangan sosial, penyatuan kelompok disabilitas dengan masyarakat atau warga sekolah berarti proses memberdayakan mereka dalam rangka menundukkan rintangan-rintangan sosial, bukan dalam rangka normalisasi, perawatan, atau pengobatan. Pemberdayaan dalam model sosial juga dipahami dalam konteks sosial yang lebih luas. Tidak hanya sebatas kelompok disabilitas yang secara individu diberdayakan agar dapat mentransendensi situasi-batas, tapi lebih keranah ruang publik pun juga harus didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan bagi kelompok penyandang disabilitas untuk dapat menaksesnya, termasuk di dalamnya adalah mengakses Pendidikan baik dari modifikasi dan akomodasi yang didesain dengan *setting* Pendidikan inklusi.

Sehingga kepala sekolah memiliki peran penting dalam pelaksanaan ini, mulai dari merencanakan dan menentukan tindakan atau kebijakan apa saja yang akan sekolah lakukan dalam memunculkan partisipasi seluruh warga sekolah, penentuan kapasitas sekolah, maksudnya disini adalah dalam peningkatan kualitas guru dan staff dalam menerima keberagaman siswa, serta dalam pengembangan fasilitas sekolah yang aksesibilitas untuk semua anak. Kepala sekolah menganggap bahwa semua anak berhak mendapat pengajaran dengan tujuan agar memberi kesempatan yang sama baik yang anak berkebutuhan khusus atau anak normal lainnya. Dengan adanya pandangan yang positif ini sangat mendukung penempatan anak di lingkungan nyata, atau saat mereka bersosialisasi dan terlebih saling menghargai sebuah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki setiap masing-masing individu. Dengan kepala sekolah memberikan kebijakan bahwa anak dapat belajar di ruang kelas reguler. Sehingga adanya pandangan positif kepala sekolah bahwa, anak berkebutuhan khusus di terima di kelas reguler ini dapat mengubah sebuah stigma atau lebaling atas keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing siswa, dan perlu diketahui bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan perbedaan yang dimiliki setiap anak itu tidak menjadi sebuah permasalahan untuk tidak memberikan ruang atau kesempatan untuk belajar di sekolah reguler atau *mainstream*.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah kepala sekolah dalam melaksanakan perannya dengan melakukan sebuah perubahan-perubahan, membuat kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi, baik dalam perencanaan, proses, dan evaluasi. Faktor pendukung dan penghambat kebijakan kepala sekolah terhadap pendidikan inklusi, pertama, adanya sikap positif menerima siswa berkebutuhan khusus baik dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan tanpa ada perbedaan. Kedua, adanya pendanaan tambahan yang diberikan pemerintah. Ketiga, kurikulum sekolah yang fleksibel. Keempat, adanya sarana dan prasarana serta sumber belajar yang mendukung. Kelima, letak lokasi sekolah yang berdekatan dengan SLB. Sedangkan faktor penghambat yaitu tidak adanya guru pendamping khusus di SDN 20 Mataram.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan temuan penelitian ini yaitu: (1) Agar sekolah tetap melakukan pelatihan kepada guru mengenai pendidikan inklusi, dan pelayananan terhadap anak berkebutuhan khusus. (2) terkait perencanaan, proses, dan evaluasi belajar di sekolah inklusi dan kelas inklusi, baik guru kelas mau guru pendamping khusus adanya kurikulum yang dimodifikasi, akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan

masing-masing anak berkebutuhan khusus, (3) untuk dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram agar terus mengevaluasi kegiatan-kegiatan di sekolah inklusi dengan membuat tim koordinator yang selalu mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan inklusi yang sesuai dengan kebijakan yang ada, yaitu memberikan kesempatan pendidikan kepada semua anak tanpa adanya bentuk diskriminatif.

Daftar Pustaka

- Akhmad Soleh, (2014), “Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap penyandang Disabilitas”, PPCI DIY : Jurnal Pendidikan Islam, Vol. III, Nomor 1. Pp 8-9.
- Amalia, N., & Kurniawati, F. (2021). Studi Literatur: Peran Guru Pendidikan Khusus di Sekolah Inklusi. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(2), 361-371. doi:<https://doi.org/10.33394/jk.v7i2.3730>
- Bailey, J. & Plessis, D. (2006). Understanding principals’ attitudes towards inclusive schooling. *Journal of Educational Administration*, 35(5), 428–438. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1108/09578239710184574>.
- Chopra, R. (2008, September 3-6). Factors influencing elementary school teachers’ attitude towards inclusive education. British Educational Research Association Annual Conference, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland. <http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/174842.pdf>
- Dinar Westri Andini, (2018) Pandangan Kepala Sekolah mengenai Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar DIY, *Jurnal Taman Cendekia*, Vol. 02, Nomor. 02, hlm, 249.
- Downing & Peckhamhardin, (2007). Inclusive Education: What Makes it a Good Education for Student with Moderate to Severe Disabilities, Sage journal, <https://doi.org/10.2511/rpsd.32.1.16>.
- E. Mulyasa. (2011). Memahami dan Memaknai Pendidikan Karakter. *Nusantara Education Riview*. Vol. 5. Nomor 1, 23.
- Isosompi, L. & Leivo, M. (2015). Becoming an Inclusive Teacher at the Interface of School and Teacher Education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 171, 686–694. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.178>
- Foreman, (2005). *Inclusion in action*, South Melbourne: Thomson.
- Fitriatun, E., & Nopita, N. (2017). Gambaran Implementasi Pendidikan Inklusif di Kota Mataram Dilihat dari Sikap Guru yang Mengajar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 3(2). doi:<https://doi.org/10.33394/jk.v3i2.477>
- Indiyanto. (2013). *Implementasi Pendidikan Inklusif*. Surakarta: FKIP UNS.
- Johandri Taufan dan Fachri Mazhub, (2014) Kebijakan-kebijakan Kepala Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sekolah X Kota Jambi, *Universitas negeri Padang*, Vol. 14, Nomor 1, 64.
- Kustawan, Dedy dan Meimulayni, Yani. (2013). *Mengenal Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus serta Implementasinya*. Jakarta Timur: Luxima Metro Media. 124.
- Musyafira, I., & Hendriani, W. (2021). Sikap Guru Dalam Mendukung Keberhasilan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(1), 75-85. doi:<https://doi.org/10.33394/jk.v7i1.3105>



- Sasadara Wahyu Lukitasari, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 4, Nomor 2, 2017. 121.
- Smith, J David. (2014). *Sekolah Inklusi Konsep dan Penerapan Pembelajaran*. (Penerjemah: Denis, Ny. Enrica) Bandung: Nuansa Cendikia. 402.
- Syafaruddin, (2008), *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, Jakarta: Rineka Cipta, 88.
- Ni'matuzahroh dan Yuni Nurhamida, (2016), *Individu berkebutuhan Khusus dan Pendidikan Inklusif*, (Malang: UMM), 44.
- Nasution. (2003), *Metode penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016.
- Sugiyono, (2013), *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 89.
- Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Bakat Istimewa*. 2009. Jakarta: Permendikna
- UNESCO. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for action on special needs education: adopted by the World Conference on Special Needs Education; Access and Quality*. Salamanca, Spain, 7-10 June 1994: UNESCO.
- Wahjosumidjo. (2002). *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta: Rajawali Pers. 88.
- Wulandari, R., & Hendriani, W. (2021). *Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Inklusi di Indonesia (Suatu Pendekatan Systematic Review)*. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(1), 143-157. doi:<https://doi.org/10.33394/jk.v7i1.3152>